

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN P2H DATIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan, S.H

Jabatan : Kepala Bagian P2H DATIN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Ridwan, S.H

Jabatan : Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Pinang, 13 Maret 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ridwan, S.H

Ridwan, S.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN P2H DATIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
1.	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1 Laporan
2.	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya	1 Laporan
3.	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1 Laporan
4.	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1 Lembaga
5.	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	1 Laporan
6.	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1 Laporan

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 139.106.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 20.998.830.000,-
TOTAL	Rp. 21.137.936.000,-

Tanjung Pinang, 13 Maret 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ridwan, S.H

Ridwan, S.H